

KEMENKOMINFO AJAK MASYARAKAT CERMAT

Hindari Investasi Ilegal, Cari Info Resmi

JAKARTA (KR) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan sejumlah kiat kepada masyarakat agar terhindar dari investasi ilegal, yakni tidak tergiur janji keuntungan besar dan selalu periksa legalitas platform.

"Kami mengajak masyarakat untuk semakin berhati-hati jika terlibat dalam kegiatan investasi. Jangan mudah tergiur dengan janji profit yang tinggi, ataupun tawaran lain serupa. Selalu periksa legalitas platform, dan laporkan kepada instansi yang berwenang apabila menemukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku," kata Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (22/2).

Masyarakat bisa mengecek legalitas sebuah perusahaan pengelola investasi dengan menghubungi beberapa akses Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di antaranya bisa menelfon 157 untuk terhubung dengan Kontak OJK 157. Lalu menghubungi WhatsApp ke nomor 081157157157 ataupun bisa melalui surat elektronik (surel) ke alamat konsumen@ojk.go.id.

Secara aktif, masyarakat juga bisa mengetahui daftar perusahaan-perusahaan investasi bodong dan tidak berada di bawah pengawasan OJK dengan mendatangi tautan web sikapiuangmu.ojk.go.id.

"Selain OJK, masyarakat bisa mengecek situs web www.bappebti.go.id milik Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan untuk memastikan legalitas perusahaan pialang berjangka (broker) untuk produk investasi seperti aset kripto," ujar Dedy Permadi sebagaimana dilansir Antara.

Tidak hanya itu, masyarakat juga bisa mengenali jenis investasi yang akan dipilih berisiko atau tidak serta bisa mengecek sebuah perusahaan pialang berjangka memiliki rekening terpisah atau tidak untuk penampungan dana nasabah.

Masyarakat harus pula skeptis dengan tawaran investasi yang memberikan pemasukan tetap atau dikenal dengan istilah 'fixed income'. Hal itu karena investasi legal justru mengikuti kondisi ekonomi dan kinerja perusahaan, sehingga apabila aset atau performa sebuah saham perusahaan bermasalah tentu akan ada kerugian ataupun penurunan harga saham.

Kementerian Kominfo juga mengajak masyarakat agar dapat aktif dan

harus mau belajar hal baru dan melitersi dirinya sendiri tentang topik keuangan agar tidak mudah tertipu oleh pemasaran produk dengan iming-iming yang menggiurkan.

"Kementerian Kominfo mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan literasi digital sehingga dapat memanfaatkan internet secara produktif, dan tidak ikut terlibat dalam kegiatan daring yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku," kata Dedy.

Adapun kelas-kelas literasi keuangan dapat ditemukan di akun-akun media sosial resmi dari Kementerian maupun Lembaga terkait seperti OJK, Bappebti, dan lainnya.

Di sisi lain, Kemenkominfo memastikan siap memutus akses pemasaran digital produk investasi ilegal atau yang tidak sesuai dengan regulasi Bappebti. "Sesuai ketentuan hukum yang berlaku, kegiatan periklanan dan promosi produk merupakan ranah Kementerian Perdagangan. Kementerian Kominfo memfasilitasi pengawasan kegiatan penyelenggara sistem elektronik dengan melakukan pemutusan akses terhadap konten promosi produk investasi yang melanggar peraturan perundang-undangan sesuai permintaan Kemendag," ujar Dedy. (San)-d

Ratusan

jangan bikin kami sopir seakan-akan yang paling bersalah, padahal kami hanya menjalankan perintah, dalam arti yang punya barang minta kami bawa *segini* dan kalau kami menolak, anak kami mau makan apa pak?" kata Dwi Agus Sutoto, perwakilan ratusan sopir angkutan yang menggelar aksi protes penerapan aturan ODOL di Kantor Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Kulwaru atau Jembatan Timbang Kulwaru di Kapanewon Wates, Kulonprogo, Selasa (22/2).

Aturan ODOL dalam UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinilai para sopir angkutan barang tidak adil. Karena ketika ada pelanggaran maka pengemudi yang menanggung semua denda. Sementara pihak perusahaan tidak pernah ditindak. Padahal mayoritas sopir menginginkan dalam pengangkutan barang sesuai aturan. "Kalau hitung-hitungan, pihak yang sangat dirugikan tentu kami para sopir. Karena sebenarnya sopir ingin muatan yang dibawa sesuai peraturan. Tapi pihak perusahaan sebaliknya minta sopir membawa barang sebanyak-banyaknya. Karena itu kalau membuat Undang Undang tidak memberi solusi tentu kami yang sangat dirugikan," tegas

Agus. Koordinator Satuan Pelayanan (Korsatpel) UPPKB Kulwaru Sigit Saryanto menjelaskan, dirinya telah bertemu perwakilan aksi dan mereka menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya keluhan terhadap aturan ODOL yang merugikan para sopir. "Kami sampaikan beberapa hal terkait aksi damai yang dilakukan para driver dan komunitas se-Indonesia. Kami dari awal tidak tahu, ini kejadian mendadak dan perwakilan mereka sudah kami terima. Intinya para driver mengeluhkan kebijakan *over dimension over loading*. *Over dimension* itu masalah panjang ukuran kendaraan, sedangkan *over loading* masalah kelebihan muatan," terang Sigit.

Dalam pertemuan tersebut para sopir juga mengeluhkan sikap perusahaan tempat mereka bekerja dianggap tidak bertanggung jawab saat para sopir melanggar ODOL. Lantaran pihak perusahaan membebankan masalah tersebut sepenuhnya kepada sopir. "Harapannya para sopir tidak lagi dirugikan dengan aturan ODOL. Intinya sasaran kita harus lebih tepat dan bagaimana para driver tidak menanggung sepenuhnya beban logistik yang dia

alami di jalan," katanya.

Ratusan sopir truk juga menutup jalan (blokade) Jalan Pantura Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan tuntutan sama. Penutupan jalan itu mengakibatkan arus lalu lintas kendaraan macet mulai dari Jalur Pantura di Banyuputih hingga Kecamatan Subah, sepanjang lebih dari satu kilometer.

Kapolres Batang AKBP Mohamad Irwan Susanto mengatakan, aksi penutupan jalan di Pantura oleh Paguyuban Truk Batang hanya sebatas tindakan spontanitas yang sudah terkoordinasi dari Semarang. "Kemudian, kami melakukan komunikasi dengan paguyuban truk agar satu perwakilan sopir truk bertemu Dinas Perhubungan Batang dan satunya ke Satuan Lalu Lintas Polres setempat. Yang jelas, kami mengikuti dula penyampaian pendapatnya," katanya.

Sopir truk, Safrudin (50) mengatakan, mereka menutup Jalan Pantura ini sebagai bentuk solidaritas para sopir yang melakukan aksi serupa di Surabaya dan Jakarta. "Aksi itu spontan tanpa ada koordinasi. Kami hanya menuntut Pemerintah tidak lagi mempermasalahkan truk yang memiliki dimensi dan muatan lebih," katanya. (Rul/Ant)-d

G20: Ekonomi Hijau

(carbon emission), yang membentuk emisi gas rumah kaca, hingga mencapai nol persen (zero carbon).

Dalam Paris Agreement juga disepakati adanya kerja sama antar negara, termasuk kerja sama antar negara yang tergabung dalam G20 untuk mencapai zero carbon pada 2050. G20 adalah forum kerja sama multilateral negara-negara dengan pendapatan kelas menengah hingga pendapatan atas. Anggota G20 terdiri Uni Eropa (EU) dan 19 negara, termasuk Indonesia. Size of economy keseluruhan anggota G20 mencakup 80% PDB Dunia dan 75% perdagangan global. Forum rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya ini membahas isu-isu penting, termasuk realisasi Paris Agreement untuk mencapai Ekonomi Hijau.

Pada Riyadh Summit 2020, Indonesia secara resmi dipilih menjadi Presidensi G20 pada summit 2022. Posisi Presidensi G20 menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat strategis dalam menentukan arah pembahasan pada summit G20. Indonesia berkesempatan mengangkat isu-isu permasalahan nasional dan global, untuk dicarikan solusinya

secara bersama-sama dengan anggota G20 lainnya. Salah satu masalah yang harus diangkat adalah implementasi komitmen negara-negara maju yang tergabung dalam G20 untuk membantu negara-negara berkembang dalam pencapaian Ekonomi Hijau.

Dalam Paris Agreement telah disepakati komitmen negara-negara maju untuk memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang dalam bentuk: bantuan teknologi, pendanaan dan pengembangan kapasitas (capacity building). Namun, hingga kini komitmen itu tidak kunjung direalisasikan. Bahkan, negara-negara EU justru kembali menggunakan energi fosil, yang tidak ramah lingkungan, pada saat terjadi krisis energi di negaranya.

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sebenarnya memiliki resources berlimpah untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam mencapai Ekonomi Hijau. Masalahnya, negara-negara berkembang itu tidak memiliki teknologi, kecukupan dana, dan keterbatasan kapasitas. Tanpa bantuan negara-negara maju di bidang teknologi, pendanaan dan pengembangan kapasi-

tas sangat sulit bagi negara-negara berkembang mencapai Ekonomi Hijau dan mustahil mencapai target zero carbon di negara-negara berkembang.

Sebagai Presidensi G20 pada 2022, Indonesia mulai sekarang harus mengkampanyekan isu penting tentang realisasi komitmen negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang dalam pencapaian Ekonomi Hijau dan zero carbon. Lalu menetapkan isu penting itu sebagai agenda utama untuk dibahas dan disepakati dalam Indondosian Summit G20 pada 2022. Kalau isu itu dapat disepakati dan direalisasikan, tidak diragukan lagi Indonesia mempunyai kontribusi yang signifikan dalam pencapaian Ekonomi Hijau dan zero carbon, baik di Indonesia, maupun di negara-negara berkembang lainnya. Presiden Jokowi, di akhir periode jabatan sebagai Presiden Indonesia, akan dicatat meninggalkan legasi penting bagi Indonesia dan negara-negara lainnya.

(Penulis adalah Dosen Departemen Ekonomi dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM dan Pengurus ISEI DIY)-d

Kapolda

Namun, pengakuan pelaku itu membuat Kapolda Jateng tidak habis pikir. Sebab, minyak goreng palsu itu karena bercampur air, maka di atas perapian belum dipakai untuk menggoreng sudah menimbulkan letupan. Ini karena airnya terdoreng dan menimbulkan suara 'blekthuk blekthuk'. "Ya.... suara 'blekthuk blekthuk' karena airnya terdoreng," ucap Kapolda.

Menurut Achmad Luthfi yang didampingi Dir Reskrimsus Polda Jateng Kombes Pol Johanson Ronald dan Kabid Humas Kombes Pol M Iqbal, terungkapnya peredaran minyak goreng palsu itu seperti diberitakan KR beberapa waktu lalu, bermula dari laporan Siti Muthoharoh, pengusaha kerupuk warga Desa Cendono, Dawe, Kudus. Bahkan, kasus minyak goreng bercampur air yang diaduk dengan zat pewarna kuning itu sempat viral di media sosial.

Dit Reskrimsus bersama Satgas Pangan dan Disperindag Jateng kemudian menindaklanjuti laporan itu dan melakukan pelacakan. Hasilnya tertangkap tersangka MNK dan AA, keduanya yang memproduksi sekaligus mengedarkannya. Salah satu pelaku dibekuk dalam pengejaran di Cilacap.

Pentas

Kepala Bagian (Kabag) Humas Biro Umum, Humas dan Protokol (UHP) Setda DIY Ditya Nanaryo Aji melaporkan kasus konfirmasi positif harian Covid-19 di DIY bertambah signifikan sebanyak 2.450 kasus sehingga total 177.257 kasus pada Selasa (22/2). Rerata kasus positif harian mencapai 14,33 persen dengan jumlah kasus aktif mencapai 17.632 kasus.

"Kasus Covid-19 trennya mengalami kenaikan lagi di DIY. Riwayat sementara kasus terkonfirmasi Covid-19 yang baru tersebut se-

Sambungan hal 1

Adapun kronologis terungkapnya peredaran minyak goreng palsu berawal ketika Sabtu (12/2) petang pukul 18.00 tersangka menghubungi ponsel korban. Tersangka berniat datang ke rumah korban, Siti Muthoharoh, menawarkan minyak goreng curah. Sebelumnya, Siti juga pernah membeli minyak goreng dari tersangka dan tidak ada masalah. Kemudian sesuai janji tersangka datang menawarkan minyak goreng kepada korban dengan harga satu liter Rp 16.500.

Korban yang membutuhkan minyak goreng untuk menggoreng kerupuk, lantas membeli 17 jeriken senilai total Rp 7.012.500 yang kemudian dituangkan ke dalam drum. Namun sisi kaget mendapati bukan minyak goreng murni, melainkan minyak bercampur air berwarna kuning. Korban lain bernama Musniah membeli lima jeriken dengan harga Rp 2.052.500. Minyak goreng palsu yang dibeli Musniah malah minyaknya dicampur air biasa. Artinya, air tanpa dicampur zat pewarna makanan.

Akibat ulahnya, tersangka dijerat pasal berlapis yakni Pasal 62 Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf f dan/atau Ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. (Cry)-d

Kementan

Dengan target luas tanam 650 ribu hektare pada 2022, sisanya sekitar 598 ribu hektare akan dibiayai melalui pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Yuris mengungkapkan lahan seluas 52 ribu hektare sudah mulai ditanami kedelai pada Januari 2022. Sementara sekitar 600 ribu lahan sisanya akan mulai ditanami kedelai pada April hingga Oktober 2022.

Lahan seluas 650 ribu hektare tersebut merupakan lahan monokultur yang sudah ada dan akan ditanami kedelai untuk bisa mencapai target produksi 2022. Selain menggunakan lahan yang sudah ada, strategi peningkatan produksi kedelai juga dilakukan dengan teknik tanam tumpang sisisip, yaitu menanam dua jenis tanaman pada

banyak 1.894 kasus berasal dari tracing kontak kasus positif dan 556 kasus periksa mandiri," ujarnya.

Ditya mengatakan angka kesembuhan pun bertambah sebanyak 417 kasus dengan demikian total kasus kesembuhan di DIY mencapai 154.303 kasus. Sementara itu, kasus pasien meninggal dunia akibat Covid-19 di DIY juga dilaporkan terjadi penambahan 6 kasus sehingga total kasus meninggal menjadi 5.322 kasus. (Ria/Ira)-f

Menaker

yang kondusif, sehingga dapat mendorong daya saing nasional," jelasnya.

Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT efektif berlaku mulai 4 Mei 2022 sehingga mengubah sejumlah ketentuan dari peraturan lama yaitu Permenaker No 19 Tahun 2015. Dalam Permenaker 2/2022 disebutkan pencairan JHT bisa dilakukan sebelum masa pensiun hanya sebesar 30 persen dengan syarat. Sedangkan untuk pencairan saldo JHT secara penuh, hanya dapat dilakukan saat peserta mencapai usia 56 tahun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Sementara dalam aturan sebelumnya, dana pekerja yang ada di dalam Program JHT dapat langsung dicairkan 1 bulan setelah tidak bekerja atau mengundurkan diri.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, Presiden Jokowi memerintahkan proses pencairan JHT dipermudah. "Tadi pagi Bapak Presiden sudah memanggil Pak Menko Perekonomian

satu bidang lahan yang sama.

"Belum nanti kita coba juga tumpang sisisip, yaitu tanam jagung dulu kemudian nanti begitu jagung panen kita tanami kedelai itu tumpang sisisip. Artinya kita pakai lahan jagung, ini bisa kita lakukan. Ada dua strategi yaitu dengan monokultur dan satu tumpang sisisip," papar Yuris.

Ia mengatakan, target produksi kedelai dalam negeri ini merupakan jangka menengah hingga jangka panjang dan belum bisa menyelesaikan persoalan harga kedelai impor yang tinggi seperti saat ini. Pihaknya menyebut rencana penanaman kedelai pada 650 ribu hektare lahan tersebut merupakan pondasi agar Indonesia bisa memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri. (Ant)-f

Sambungan hal 1

dan Ibu Menteri Tenaga Kerja, dan Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu disederhanakan, dipermudah," kata Pratikno.

Kemenaker pada 4 Februari 2022 mengeluarkan Permenaker No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT. Namun banyak

pihak yang memprotes pemberlakuan peraturan tersebut mulai dari serikat pekerja hingga anggota DPR, khususnya soal aturan pencairan manfaat JHT.

"Agar dana JHT itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini, terutama yang sedang menghadapi PHK," tambah Pratikno. (Sim/Ant)-d



Prakiraan Cuaca						Rabu, 23 Februari 2022	
Lokasi	Pagi	Siang	Malam	Dini Hari	Suhu °C	Kelembaban	
Bantul	☁	☁	☁	☁	23-31	70-95	
Sleman	☁	☁	☁	☁	22-30	70-95	
Wates	☁	☁	☁	☁	24-31	70-95	
Wonosari	☁	☁	☁	☁	23-31	70-95	
Yogyakarta	☁	☁	☁	☁	23-31	70-95	
☀️ Cerah ☁ Berawan ☁ Udara Kabur ☁ Hujan Lokal ☁ Hujan Pañir						Grafis : Arko	



Hanif Al Fatta M Kom
Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas AMIKOM Yogyakarta

KURANG lebih 1 tahun ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi telah mencanangkan konsep Merdeka Belajar kampus Merdeka, sebuah ide pembelajaran dimana mahasiswa bisa mengambil bentuk kegiatan perkuliahan di luar kampus sebanyak 20 SKS untuk bisa

MBKM dan Pervasive Learning

dikonversi menjadi mata kuliah yang diambil di program studi masing-masing. Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan mengikuti salah satu diskusi yang diselenggarakan kemdikbudstek terkait salah satu bentuk kegiatan perkuliahan MBKM yaitu Magang dan Studi Independen Bersertifikat. Pada kegiatan ini mahasiswa mengikuti magang pada perusahaan-perusahaan Mitra pemerintah dimana setelah melalui seleksi yang ketat mahasiswa bisa kemudian melakukan proses magang di perusahaan impian mereka.

Saya kembali teringat dengan konsep pembelajaran pervasif (Pervasive Learning) yang dikemukakan oleh Dan Pontefracit sekitar tahun 2013 pada buku yang berjudul *Flat Army: Creating a Connected and Engaged Organization* (Wiley, 2013). Dan Pontefracit mengemukakan ide menarik dimana konsep pembelajaran tidak

boleh dibatasi hanya pada ruangan kelas saja. Proses pembelajaran yang baik adalah proses belajar menembus batas ruang kelas dimana model pembelajaran ini secara ideal menawarkan seperti proses pembelajaran dilakukan di kelas, seperti bisa dilakukan secara informal dan seperti lagi dilakukan secara pembelajaran sosial. Tentunya angka seperti bukan angka baku yang sangat mungkin berubah komposisinya menyesuaikan situasi dan kondisi pembelajaran itu sendiri.

Pembelajaran formal di era teknologi informasi bisa sangat beragam, mulai dari pembelajaran pada kelas fisik, maupun pembelajaran pada kelas virtual. Pembelajaran formal juga dapat berbentuk pembelajaran online seperti *elearning*, *conference*, dan *game-based learning*.

Adapun pembelajaran secara informal dapat berlangsung dengan beberapa bentuk. Misalnya yang paling

sederhana adalah dengan membaca buku, website atau artikel tertentu.

Pembelajaran informal juga bisa dalam bentuk mentoring atau tutoring. Beberapa workshop non formal juga bisa masuk dalam kategori pembelajaran ini.

Kalau boleh diakui, baik ditingkat sekolah dasar menengah bahkan pendidikan tinggi, proses pembelajaran di kelas masih memegang porsi pembelajaran yang dominan pada negara seperti Indonesia. Kabar baiknya seiring dengan semakin mudahnya akses informasi melalui dukungan teknologi informasi, pembelajaran informal melalui forum-forum diskusi, grup Wa bahkan Youtube sekarang menjadi hal yang umum dilakukan para siswa maupun mahasiswa. Model pembelajaran ini murah, tepat sasaran dan sangat cocok untuk para digital native.

PR besar yang menanti adalah pembelajaran sosial, dimana komunitas

juga memberikan andil pada pemberian knowledge maupun skill pada para pembelajar. Kebijakan MBKM yang digagas dan dilaksanakan Kemdikbudstek memberikan jawaban yang sangat sistematis pada persoalan ini. MBKM dihadirkan sebagai ekosistem yang secara sadar atau tidak disadari mahasiswa mampu menghadirkan bagian pembelajaran informal maupun sosial. Tengok saja program mahasiswa magang yang tadi saya sebutkan.

Di perusahaan, masyarakat industri, atau komunitas membantu mahasiswa mempelajari kompetensi lulusan yang diinginkan melalui terjun langsung pada kasus nyata. Mentor dan teman magang adalah sarana pembelajaran informal dan sosial terlaksana. Pada bentuk kegiatan perkuliahan lain misalnya kampus mengajar, proyek kemanusiaan maupun KKN tematik, kegiatan pembelajaran sosial semakin terasa karena memang



mahasiswa diterjunkan langsung dalam komunitas tertentu dan belajar untuk memiliki peran pada komunitas tersebut.

Pembelajaran sosial ini juga menjawab kritik bahwa perguruan tinggi adalah menara gading yang tidak terakses oleh masyarakat diluar civitas academica. Mendekatkan mahasiswa dan dosen pembimbing langsung pada dunia industri, komunitas, masyarakat dan memberi kontribusi langsung adalah model pendidikan yang paling berkesan menurut saya. Sekali mahasiswa menyadari bahwa dia memainkan peranan sosial yang tidak kecil untuk circle di luar dirinya, maka keinginan mahasiswa tersebut untuk membuktikan dia capable melakukan hal yang lebih besar akan tumbuh. Dan pada generasi muda seperti inilah masa depan bangsa dan negara kita amanatkan.***